



PERANAN ORGANISASI MAHASISWA DALAM PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN TAHUN 1999—2000

Eko Ribawati¹, Acep Rahmat², Ali Fadillah³

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: eko.ribawati@untirta.ac.id, aceprahmattt0@gmail.com,
ma.fadillah2021@gmail.com

Abstract

This research explained about how the role of student organizations in the establishment of Banten Province in 1999-2000. The students who are visionary considered have a real involvement in the development of this country. The establishment of Banten Province can not be separated from the role of Banten students who are solid. They can cooperate collectively with various elements, such as local governments, scholars, culturalists, youth people, organizations, and other communities. In addition, the purpose of this research is to; (a) explain the background of the involvement of Banten student organizations in the establishment of Banten Province in 1999-2000; and (b) explain the role of Banten student organizations in the establishment of Banten Province in 1999-2000. This research uses historical methods or methodology based on history. The use of this method is expected to facilitate researchers in analyzing the data which were obtained to be developed descriptively so that a rational narrative is exposed to answer the problem formulation. The findings in this study are; (1) the emergence of collective awareness about the very deep understanding on primordiality of Banten students post the reform; (2) intertwining of good cooperation between students and the community in the establishment of Banten Province; (3) the creation of the Banten student movement in the establishment of Banten Province. The conclusion of this research is the role of student organizations which is being an umbrella organization for the young intellectual Banten, Assisting the acceleration of province establishment by using either social movement method or diplomacy by get involved in a forum and association which is built in a big scale in order to deliver aspiration from Banten society.

Keywords: *banten students, establishment banten province, history, movement*

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peranan organisasi mahasiswa dalam pembentukkan Provinsi Banten tahun 1999—2000. Mahasiswa yang dianggap sebagai kaum visoner dianggap mempunyai keterlibatan nyata dalam pembagunan negeri ini. Terbentuknya Provinsi Banten tidak terlepas dari peranan mahasiswa Banten yang begitu solid. Mereka dapat bekerja sama secara kolektif dengan berbagai elemen, seperti pemerintah daerah, ulama, budayawan, pemuda, akademi, ormas, dan kalangan masyarakat lainnya. Tujuan penelitian ini untuk; (a) menjelaskan latar belakang keterlibatan organisasi mahasiswa Banten dalam pembentukkan Provinsi Banten tahun



1999—2000; dan (b) menjelaskan peranan organisasi mahasiswa Banten dalam pendirian Provinsi Banten tahun 1999—2000. Penelitian ini menggunakan metode historis atau metode sejarah. Penggunaan metode tersebut diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh agar dikembangkan secara deskriptif sehingga sebuah narasi yang rasional untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian ini adalah; (1) timbulnya kesadaran kolektif mengenai paham keprimordialan yang sangat mendalam pada diri mahasiswa Banten pasca reformasi; (2) terjalannya kerja sama yang baik antara mahasiswa dan masyarakat dalam pembentukan Provinsi Banten; (3) terciptanya gerakan mahasiswa Banten dalam pembentukan Provinsi Banten. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peranan organisasi mahasiswa yang menjadi wadah bagi kaum intelektual muda Banten, membantu percepatan pembentukan provinsi dengan menggunakan metode gerakan sosial maupun diplomasi dengan ikut melibatkan diri dalam forum-forum serta perkumpulan yang dibangun dalam skala yang lebih besar guna membawa aspirasi masyarakat Banten.

Kata kunci: mahasiswa Banten, sejarah, gerakan, pembentuk Provinsi Banten

PENDAHULUAN

Gerakan reformasi tahun 1998 merupakan salah satu momentum sejarah bangsa Indonesia yang diprakarsai oleh kaum muda dan mahasiswa atas jawaban dari kondisi ekonomi dan politik negara pada saat itu. Kaum muda dan mahasiswa dari berbagai daerah berjibaku guna mendesak pemerintah pusat yang sarat akan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme di wilayah para pejabat tinggi negara. Selain itu, dampak dari kelalayan rezim Orde Baru juga membuat kondisi yang merugikan masyarakat. Tidak perlu menghitung berapa banyak korban dan seberapa berat penderitaannya, tetapi peristiwa itu telah memicu terbentuknya pandora's box yang telah menyimpan begitu lama berbagai penyakit utopis (Moh Ali, 2021).

Beberapa tahun kemudian Indonesia bangkit kembali, keluar dari krisis dengan memulihkan situasi politik dengan mengkampanyekan reformasi konstitusional dan institusional. Begitu pula kondisi ekonomi, meskipun lamban merayap pulih (Moh Ali, 2021). Semangat



reformasi bergelora di setiap daerah di Indonesia membawa semangat yang baru untuk memperbaiki kondisi bangsa pada saat itu. Banyak hal yang dianggap mustahil pada masa rezim Orde Baru kini dengan mudah diwujudkan. Beberapa tutunan yang dulu dianggap tabu kini sudah tidak asing lagi karena sudah menjadi isu bersama. Namun satu hal yang harus kita ketahui, dengan tumbuhnya gerakan reformasi membuat kondisi bangsa mulai menjadi stabil.

Semangat reformasi senantiasa terus bergelora dalam jiwa masyarakat yang menginginkan perubahan. Peristiwa turunnya Soeharto yang ditandai dengan maraknya gerakan reformasi menjadi keran pembuka demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Hal paling menonjol adalah adanya pemisahan wilayah-wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tercatat pada tahun 1999 sampai tahun 2004 sebanyak 8 provinsi baru dibentuk dari hasil pemekaran wilayah sebelumnya, antara lain Provinsi Maluku Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau. Kasus pemisahan ini dipelopori beberapa wilayah yang ingin memisahkan diri dari NKRI (Aziz, 2022). Menurut Aziz (2022) bahwa Provinsi Banten mempunyai komitmen yang erat ketika ingin mendirikan provinsi. Masyarakat Banten akan tetap setia pada NKRI dan akan menempuh jalur secara administratif dalam pembentukan provinsi tersebut. Kita ambil contoh daerah Riau Kepulauan, ia telah terang-terangan menegaskan bahwa akan memisahkan diri dari NKRI jika tidak diizinkan membentuk sebuah provinsi.

Masa peralihan pemerintahan menjadi sesuatu hal yang berat bagi pemerintah yang baru. Banyaknya persoalan yang ada menjadi suatu tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pemimpin yang baru. Beberapa kebijakan baru dan kelahiran undang-undang baru terus



dikeluarkan demi keberlangsungan dalam implementasi negara demokrasi. Berdasarkan UUD 1945 tentang pemerintah daerah nomor 22 tahun 1999 yang telah diamandemenkan menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Menyatakan dalam prosesnya menyediakan keleluasaan yang sangat luas bagi kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-undang tersebut merupakan skema otonomi daerah yang diterapkan mulai Tahun 2000. Undang-undang ini dibuat untuk menciptakan pola hubungan yang demokratis. Undang-Undang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberdayakan daerah dan masyarakatnya serta mendorong daerah merealisasikan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas yang sebelumnya tidak diberikan ketika rezim Orde Baru.

Paling tidak ada dua faktor yang berperan kuat dalam mendorong lahirnya kebijakan otonomi daerah berupa Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang sudah diamandemenkan menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pertama, faktor internal yang didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisme di masa lampau. Kedua, adalah faktor eksternal yang dipengaruhi oleh dorongan internasional terhadap kepentingan investasi terutama untuk efisiensi dari biaya investasi yang tinggi sebagai akibat korupsi dan rantai birokrasi yang panjang. Secara khusus, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Aziz, 2022).

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa otonomi daerah sendiri merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah otonom untuk mengurus dan mengatur masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah otonom dan perundang-undangan. Keuntungan dari penerapan



otonomi daerah ini adalah daerah bisa menerapkan dasar-dasar demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam masyarakat secara mandiri.

Makna otonomi daerah lebih bijaksana apabila dapat diartikan secara luas dalam kebebasan yang bertanggung jawab untuk memilih dan menentukan urusan daerah sesuai kebutuhan daerah itu sendiri dengan segala kemampuan dan dengan batas-batas dalam anggaran yang membiayainya. Selanjutnya, otonomi daerah tidak diartikan bebas semaunya, dan dengan begitu daerah dapat mempertimbangan segala urusannya bukan berdasarkan sedikit atau banyaknya tetapi lebih kepada manfaat yang diperoleh masyarakat daerah tersebut (Aziz, 2022).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Provinsi Banten sendiri pernah mengajukan pendirian Provinsi sebanyak kurang lebih dua kali sebelum lahirnya UU No. 22 Tahun 1999, namun usaha tersebut selalu mendapatkan penolakan, usaha pertama kali dalam pengajuan terjadi disaat pelabuhan Merak-Bakauheni dibuka pada tahun 1952-1953 (Lubis & Ali, 2014).

Banten yang dahulu merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat ikut serta mengimplikasikan kebijakan otonomi daerah, sehingga Provinsi Banten memiliki kemandirian dalam melaksanakan pemerintahan dan menentukan sendiri kemajuan dalam pembangunan. Namun, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, hal ini yang membuat Provinsi Banten menjadi Provinsi baru yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat.

Pemekaran Provinsi Banten tidak saja hanya melihat peluang dalam momentum reformasi namun dengan potensi yang dimiliki dan letak geografis Banten itu sendiri membuat semangat dalam pendirian



Provinisi ini lebih kuat. Hal ini paling tidak didasari dari beberapa alasan yang cukup mendasar. Pertama, secara bottom up tutunan pendirian Provinsi Banten sudah menjadi tutunan bersama sebagian besar masyarakat Banten. Kedua, secara top down tutunan itu telah direstui oleh seluruh level kelembagaan dari institusi formal yang ada (Nazara, 2006). DPRD dan Pemda di lingkungan kapresidenan Banten ataupun di tingkat wilayah Jawa Barat meskipun lumayan alot dalam perjalanannya. Pemerintah pusat dari 10 fraksi yang ada di DPR separuhnya menyetujui pembentukan Provinsi Banten, disamping itu, secara pribadi presiden KH. Abdurahman wahid bahkan pernah memberi dukungannya secara moral saat berkunjung ke Banten tahun 2000 (Lubis & Ali, 2014).

Kuatnya tuntutan dan dukungan terhadap lahirnya Provinsi Banten tentu perlu dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengkaji secara kritis berbagai potensi yang dimilikinya. Ada tiga sumber potensi utama yang dimiliki masyarakat Banten, yaitu potensi religiusitas yang tercermin dalam kekayaan spiritualnya, potensi ekonomi yang terkandung dalam kekayaan alamnya serta potensi sosio-kultural yang tercermin dalam khazanah sosial-kemasyarakatannya (Mansur, 2001).

Perjalanan baik melalui diplomasi dan acuan dalam undang-undang serta kesadaran masyarakat luas di Banten yang menginginkan akan terwujudnya sebuah peristiwa pembentukan Provinsi Banten tidak saja berjalan lancar banyak hal luar biasa yang ternyata ikut serta dalam perintisannya, dan tidak sedikit tokoh, golongan, dan organisasi yang ikut terlibat dalam pembentukan Provinsi Banten. Hal ini jelas didasari dari bentuk kesadaran secara kolektif dan semangat akan perubahan dalam tatanan masyarakat Banten. Sejalan dengan beberapa golongan tua baik Jawara, Ulama dan tokoh elit politik



melancarkan serangkaian persiapan mewujudkan pembentukan Provinsi Banten.

Menurut Aziz (2022) upaya mewujudkan terbentuknya Provinsi Banten segera menyusul semangat para generasi muda Banten yang tersebar di seantero tanah air, khususnya mahasiswa yang berasal dari Banten yang sedang menimba ilmu di kota lain tidak ingin tertinggal dalam perjuangan pembentukan Provinsi Banten ini. Beberapa golongan organisasi mahasiswa pun mengambil peran dalam perjuangan ini, mahasiswa yang terhimpun dalam organisasi kekeluargaan dan primordial atau kedaerahan menghimpun kembali kader atau anggotanya untuk ikut berperan baik secara pribadi atau organisasi dalam pendirian Provinsi Banten ini. Gerakan tercermin pada saat aksi mahasiswa Banten di DPRD Jawa Barat, Kompleks Gedung Sate Bandung, tahun 1999 baik dilakukan oleh organ kemahasiswaan yang ada di maupun di luar Jawa Barat. Tuntutan menyeruak bahwa kaum muda itu menyadari betul akan ketertinggalan kampung halamannya (Aziz, 2022). Tidak sedikit mahasiswa yang turut ikut terlibat dalam menyambut pendirian Provinsi Banten dengan mengikut sertakan diri dalam perhimpunan ataupun organisasi yang didirikan oleh beberapa tokoh di Banten dengan mengatasnamakan delegasi dari tiap-tiap Universitasnya (Mulyana, 2009).

Respon dan antusiasme di berbagai kalangan masyarakat tentang ide pembentukan Provinsi Banten ini telah mendorong elitnya untuk melakukan konsolidasi yang lebih teratur, sistematis, dan terorganisir. Di tengah euforia reformasi yang terhembus kedalam pelosok daerah, beberapa elitnya merespon ide ini dengan dilatarbelakangi kepentingan yang berbeda, membentuk beberapa kelompok seperti LSM, organisasi dan himpunan untuk mewujudkan ide pembentukan



Provinsi Banten. Organisasi-organisasi tingkat lokal begitu kuat karena didukung oleh tokoh yang sudah diakui dan didorong oleh kalangan tokoh didaerah, di samping kalangan masyarakat yang terorganisir (Aziz, 2022).

Berbagai organisasi mahasiswa melakukan konsolidasi di berbagai daerah dengan membentuk forum dan berbagai kelompok untuk mengaktualisasikan perannya dalam pembentukan Provinsi Banten. Ini terjadi baik di daerah Banten maupun mahasiswa Banten yang sedang menimba ilmu di luar Banten dengan masuk ke dalam sebuah forum perjuangan seperti Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), Keluarga Mahasiswa Tirtayasa (Kamayasa), Keluarga Mahasiswa Pandeglang (Kumandang), Keluarga Mahasiswa Banten (KMB) dan Ikatan Keluarga Mahasiswa Banten (IKMB). Organisasi-organisasi tersebut masuk kedalam sebuah forum yang bernama Forum Mahasiswa Banten (Forban). Organisasi-organisasi yang terlibat dalam sebuah forum perjuangan memiliki suatu visi yang sama, yang pada akhirnya menjadi alasan kuat untuk bergerak dalam perjuangan pembentukan Provinsi Banten (Lubis & Ali, 2014).

Kumala, Kamayasa, Kumandang, KMB, dan IKMB merupakan sebuah organisasi kadaerahaan yang beranggotakan mahasiswa yang sedang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi dan berdomisili dari daerah seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan wilayah lainnya. Peranan yang cukup besar diambil oleh mahasiswa oleh berbagai jalur baik melalui demonstrasi ataupun diplomasi guna mempercepat terwujudnya cita-cita Banten menjadi salah satu Provinsi baru pada saat itu (Lubis & Ali, 2014).

Pengorganisasian gerakan semacam ini tentu bukan hanya implementasi peranan mahasiswa terhadap isu yang berkembang, namun lebih dari upaya-upaya membentuk gerakan sosial yang lebih



efektif dan efisien dalam target dan sasaran gerakan tersebut (Aziz, 2022).

Peranan yang diambil terlepas dari permasalahan yang berkembang ialah dengan menciptakan sebuah gerakan sosial dikalangan mahasiswa yang tentu sebagai anggota kader dan turut melibatkan masyarakat sipil yang memiliki cita-cita yang sama dalam pendirian Provinsi Banten. Gerakan sosial terjadi karena manifestasi dari suatu keadaan yang tidak berpihak pada masyarakat mayoritas dan sebagai upaya untuk mewujudkan harapan (Landsberger, 1970). Dari beberapa rumusan dalam pemikiran para ahli dalam tahap-tahap gerakan sosial itu bekerja, gerakan sosial di Banten sangat relevansi secara keadaan yang memang banyaknya ketidakpuasan dalam suatu keadaan, dan adanya sebuah agitasi yang memotivasi secara sadar serta adanya dorongan tokoh-tokoh besar dalam perjuangan (Aziz, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode historis atau metode sejarah. Menurut Daliman (2012) menjelaskan bahwa metode sejarah merupakan metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur, teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah. Penggunaan metode historis sangat sesuai dengan penelitian ini. Menurut Daliman (2012) dalam melaksanakan penelitian sejarah terdapat empat tahapan yang harus dilakukan, sebagai berikut: 1) Heuristik, pada tahap ini, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber tertulis yang berhubungan judul terkait berupa buku, jurnal ilmiah, makalah, skripsi dan disertasi yang

relevan dengan permasalahan yang dikaji; 2) Kritik sumber, di dalam tahap ini, hal yang dilakukan adalah berupaya melakukan penyelidikan, pencacatan, menganalisa dan kemudian diuji secara keabsahannya tentang keaslian sumber (otentitas) melalui kritik internal dan eksternal; 3) Interpretasi, diinterpretasikan mengenai bagaimana dinamika yang terjadi disaat proses pembentukan Provinsi Banten.; 4) Historiografi, dalam tahapan ini, dituliskan seluruh rangkaian kegiatan penelitian sejarah dan hasil dari penelitian tersebut dalam bentuk sebuah laporan penulisan sejarah atau historiografi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Keterlibatan Organisasi Mahasiswa Banten Dalam Pendirian Provinsi Banten Tahun 1999—2000.

Pergerakan mahasiswa Banten dalam mendirikan Provinsi Banten bukanlah tanpa alasan. Gelombang gerakan mahasiswa pada peristiwa ini telah melewati berbagai macam peristiwa yang sangat luar biasa sehingga mampu membuat suatu kesadaran kolektif mengenai paham keprimordialan. Paham tersebut mereka arahkan untuk membuat kesejahteraan atau keamanan bagi masyarakat Banten itu sendiri.

Pada tahun 1997, kondisi negara kesatuan Republik Indonesia mengalami guncangan krisis ekonomi yang sangat luar biasa. Kejadian ini membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Atas peristiwa itu, masyarakat serta mahasiswa mendesak agar pemerintah segera melakukan berbagai langkah untuk mengembalikan kesetabilan ekonomi (Chandakirana, 1989).

Mahasiswa Banten dengan mahasiswa lainnya, sedikitnya memiliki kontribusi dalam mendesak pemerintah orde baru untuk segera memberikan solusi bagi kesejahteraan masyarakat. Peraktik korupsi,



kolusi, dan nepotisme juga menjadi salah satu musuh besar yang harus dilawan secara bersama dalam pemerintahan orde baru. Berbagai macam gerakan yang dilakukan akhirnya diakhiri oleh mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 22 Mei 1998. Pergantian presiden menjadi sebuah harapan yang positif dalam memperbaiki kondisi pada saat itu. Kepemimpinan Presiden Soeharto akhirnya digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie untuk melanjutkan masa jabatannya (Mulyana, 2009).

Masa peralihan orde baru ke masa reformasi menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa Indonesia, khususnya mahasiswa Banten yang ikut dalam perjuangan tahun 1997-1998. Semangat tersebut akhirnya mengakar dalam diri mahasiswa Banten. Kesadaran yang tumbuh akhirnya mendorong para mahasiswa untuk memajukan daerahnya, yaitu Banten sebagai suatu daerah yang memiliki otonominya sendiri dalam mengelola sumber daya alam serta sumber daya manusianya (Nazara, 2006).

Kebijakan mengenai otonomi daerah akhirnya direspon positif oleh Presiden B.J. Habibie lewat undang-undang yang dibentuknya. UU nomor 22 tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah berlaku sejak era pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerahnya secara proporsional. Diwujudkan atau dilaksanakan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, pesan serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan.

Peraturan ini menjadi landasan secara administratif mengapa Banten harus mendirikan provinsi sendiri dan berpisah dari Provinsi Jawa Barat. Selain itu, faktor kesenjangan ekonomi serta ketidakpuasan

masyarakat Banten kepada daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Barat juga menjadi alasan mengapa masyarakat Banten menginginkan pemekaran wilayah. Masyarakat Banten manyakini, bahwa Banten akan bisa sejahtera jika Banten memiliki otonomi daerahnya sendiri sehingga dapat mengatur sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Banten. Di bawah ini peneliti akan menjelaskan mengenai apa saja hal yang melatar belakang keterlibatan organisasi mahasiswa Banten dalam pendirian Provinsi Banten pada tahun 1999—2000 (Rasyid, 1997).

1. Euforia Pasca Reformasi Pada Tahun 1998

Indonesia pada tahun 1997 dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal ini terjadi karena Indonesia sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Hal tersebut terlihat jelas dengan banyak tayangan televisi mengenai krisis keadilan. Selain menyebabkan sebagian sektor perekonomian lumpuh, hal itu juga membuat kondisi sosial masyarakat menjadi terganggu. Dari berbagai macam persoalan yang ada, terdapat beberapa orang yang menyindir keterlambatan pemerintah dalam memberikan solusi mengenai kerisis ekonomi, selain itu pemerintah juga lambat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Disamping itu, pejabat negara dan elit politik dengan gagahnya melakukan kegiatan korupsi dan nepotisme. Perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini telah dalam batas kondisi yang memprihatinkan. KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) telah begitu banyak menguras kekayaan negara (Tihami, 2000).

2. Terbentuknya Kebijakan Otonomi Daerah

Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang memiliki keberagaman budaya serta kekayaan alam. Kondisi wilayah akan mempengaruhi suatu budaya untuk berkembang. Serta kekayaan



alam di Indonesia juga terbentang luas dari Sabang sampai Marauke. Dari banyaknya keberagaman budaya serta kekayaan alam yang ada di Indonesia harapannya dapat dikelola dengan baik di wilayahnya sendiri. Otonomi daerah hadir untuk membuat solusi yang efisien dan efektif bagi kemajuan daerahnya masing-masing. Harapannya, pemerintah dapat mengatur potensi daerahnya sendiri. Karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui potensi dari kekayaan apa saja yang ada di daerahnya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, kebudayaan, serta kebutuhan daerah itu sendiri.

3. Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat dalam Membentuk Provinsi Banten

Dengan berakhirnya kepemimpinan Orde Baru yang dianggap sebagai pemerintahan otoriter dan represif, kini masyarakat seolah mendapatkan kondisi yang baru untuk menuju gerbang kemerdekaan yang sesungguhnya. Peralihan zaman Orde Baru ke zaman reformasi sedikitnya memberikan beberapa kepuasan kepada masyarakat. Keputusan untuk membebaskan tahanan politik, menjamin kebebasan pers, membuka atau mendirikan partai politik baru, pembaruan hukum, dan kebijakan otonomi daerah memberikan udara segar bagi masyarakat Indonesia.

Negara hadir menjadi fasilitator serta pelindung bagi masyarakatnya sendiri. Keadaan tersebut sangat-sangat dimanfaatkan sebagai momentum baik bagi para tokoh di Banten dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu mendirikan Provinsi Banten. Kesadaran tersebut membuat gerakan sosial yang tumbuh di masyarakat serta mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum terpelajar



tentu saja memiliki andil yang besar untuk mengawal cita-cita tersebut (Soekanto, 2002).

B. Menjelaskan peranan organisasi mahasiswa Banten dalam pendirian Provinsi Banten tahun 1999—2000.

Gerakan mahasiswa kembali mencuat jelang Reformasi 1998, saat Orde Baru yang awal kelahirannya didukung gerakan mahasiswa, justru harus jatuh di tangan gerakan yang sama. Dari proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia, bisa diambil kesimpulan bahwa keterlibatan gerakan mahasiswa merupakan sebuah keniscayaan. Namun, amat disayangkan bahwa selama ini tidak ada literatur yang mengupas keterlibatan mahasiswa dalam proses pembentukan Provinsi Banten secara gamblang. Dalam konteks primordial, tentu saja keterlibatan gerakan mahasiswa yang dimaksud adalah tentang gerakan mahasiswa asal Banten.

1. Peran Mahasiswa dan Masyarakat dalam Pembentukan Provinsi Banten.

Terbentuknya provinsi Banten memiliki makna yang sangat luar biasa bagi masyarakat Banten itu sendiri. Banyaknya kalangan yang memperjuangkan terbentuknya provinsi Banten menciptakan suatu kesadaran kolektif. Contoh kesadaran kolektif yang pernah terjadi adalah ketika mahasiswa dan masyarakat bertemu dalam satu tujuan, yaitu mendirikan provinsi Banten. Dalam peristiwa ini, mahasiswa menjadi salah satu penggerak lapangan untuk mendesak pemerintah untuk mempercepat pengesahan terkait pemekaran wilayah sehingga terjadinya beberapa gerakan yang dilakukan mahasiswa (Sukmana, 2016). Gerakan tersebut seperti demonstrasi serta membuat acara-acara yang dapat membangkitkan rasa kecintaan terhadap Banten.



Tujuannya agar seluruh mahasiswa dan masyarakat dapat berjuang dalam satu rasa dan tujuan.

Tentunya keduanya akan menjadi suatu kekuatan yang sangat besar jika saling mendukung dan bersinergi khususnya dalam menghadapi kekuatan dan dominasi negara. Sinergi dan kolaborasi dari dua kekuatan masyarakat inilah yang memungkinkan dalam waktu yang relatif singkat sekitar satu tahun negara memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat Banten. Terhitung sejak ide gagasan pembentukan Propinsi Banten dicetuskan kembali di Pesantren Darul Iman, Pandeglang tanggal 5 Pebruari 1999 sampai terbentuknya Propinsi Banten tanggal 4 Oktober 2000.

Sinergi antara kekuatan masyarakat sipil dan masyarakat politik ini kemudian menjadi kata kunci keberhasilan gerakan pembentukan Propinsi Banten, tentunya di samping adanya faktor-faktor lain yang mendukung (Sukmana, 2016). Fakta ini semakin shahih karena gerakan untuk membentuk Propinsi Banten juga sempat dilakukan pada dekade 1960-an oleh kalangan masyarakat politik atau politisi asal Banten di DPR-GR tetapi kandas dan akhirnya terbungkam sampai menunggu tiga dekade kemudian setelah Soeharto jatuh. Pembangkitan kembali ide ini kemudian dicetuskan dan digalang dari bawah dulu, mulai dari kalangan masyarakat sipil, sampai kemudian direspon kalangan masyarakat politik baik di DPRD se-Banten maupun birokrat dan politisi di DPR RI. Tekanan dari dua kekuatan inilah yang menjadikan negara akhirnya "tunduk" pada keinginan masyarakat sipil ini.

Pengembangan gerakan sosial masyarakat sipil di tingkat bawah akhirnya mendapat respon dan dukungan masyarakat politik di

tingkat atas sehingga jalan bagi perwujudan aspirasi rakyat ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Boleh dikatakan bahwa jalur ini relatif "aman dan cepat" dalam upaya perwujudan aspirasi rakyat karena terdapat visi dan persepsi yang sama di antara keduanya. Jalur yang biasa terjadi dalam proses perubahan adalah ketika antara masyarakat sipil dan masyarakat politik atau negara terdapat jarak yang lebar dan bahkan kedua belah pihak bertahan dalam posisinya masing-masing sehingga tidak ada titik temu bahkan yang terjadi malah benturan dan adu kekuatan. Tinggal dalam konteks ini siapa yang lebih kuat dan tendensi dunia sekarang ini lebih berpihak kepada kekuatan masyarakat sipil dan karenanya dianggap sebagai periode kemenangan demokrasi.

2. Gerakan Mahasiswa Banten dalam Pembentukan Provinsi Banten.

Berbicara tentang reformasi tidak terlepas dari pembicaraan mengenai peranan mahasiswa. Setiap orang di negeri ini yang peduli akan nasib bangsanya pasti mengetahui bahwa para mahasiswa adalah pelopor dan pejuang reformasi. Para mahasiswalah yang pertama mencetuskan dan mengobarkan semangat pembaharuan. Perjuangan ini berdasarkan pada keterpurukan nasib bangsa sebagai akibat dari krisis yang menderanya. Di dalam diri para mahasiswa ada keyakinan bahwa krisis multidimensional ini hanya akan terselesaikan jika dilakukan reformasi total (Mansur, 2001). Krisis multidimensional yang dialami oleh negara Indonesia terdapat dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial. Terdorong oleh kesadaran ini, para mahasiswa tampil ke pentas politik nasional menyuarakan kepentingan atau suara rakyat. Banyak yang mereka perjuangkan,



mulai dari kepentingan politik sampai kepada kepentingan masyarakat secara umum.

Dalam pembentukan Provinsi Banten, para mahasiswa Banten memiliki kontribusi yang sangat luar biasa. Inisiatif serta keinginannya menjadi sebuah semangat yang konkret dalam mewujudkan cita-cita yang mulia. Aspirasi masyarakat yang pada akhirnya dapat disambungkan kepada mahasiswa, akhirnya dapat direspon positif oleh mahasiswa dalam membuat beberapa rangkaian gerakan.

Sebuah pertemuan terjadi di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Tangerang Se-Bandung Raya (Himata Bandung Raya). Meski tidak pasti tanggal dan harinya, tetapi pada hari itulah Forum Pergerakan Mahasiswa Banten, yang kemudian dikenal dengan nama FORBAN dibentuk. Organisasi taktis yang lahir berdasarkan kesepakatan dari sembilan organisasi mahasiswa primordial Banten di Bandung ini, akhirnya berhasil menjadi satu wadah gerakan mahasiswa Banten di Bandung mendukung pembentukan Provinsi Banten. Untuk menghindari dominasi satu organisasi dari organisasi yang lain, maka disepakati sembilan orang perwakilan dari sembilan organisasi mahasiswa primordial yang tergabung dalam FORBAN dipilih menjadi presidium.

FORBAN kemudian gencar melakukan aksi demonstrasi di Gedung Sate, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera membahas tentang pembentukan Provinsi Banten. Mayoritas eksponen FORBAN mengaku aksi demonstrasi rutin dilakukan di Bandung. Akan tetapi, sampai penelitian ini terbit, tidak ada dokumentasi atau artikel media massa yang bisa menggambarkan



intensitas gerakan FORBAN di Bandung. Hanya beberapa momen kecil yang diingat oleh eksponen FORBAN itu sendiri.

KESIMPULAN

Peranan mahasiswa Banten dalam mendirikan Provinsi Banten bukanlah tanpa alasan. Gelombang gerakan mahasiswa pada peristiwa ini telah melewati berbagai macam peristiwa yang sangat luar biasa sehingga mampu membuat suatu kesadaran kolektif mengenai paham keprimordialan. Kesadaran yang tumbuh akhirnya mendorong para mahasiswa untuk memajukan daerahnya, yaitu Banten sebagai suatu daerah yang memiliki otonominya sendiri dalam mengelola sumber daya alam serta sumber daya manusianya dengan membangun gerakan diberbagai daerah serta ikut serta dalam beberapa forum yang dibangun oleh kalangan tua di Banten guna melancarkan diplomasi menyuarakan aspirasi masyarakat Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Y. M. A. (2022). Dimensi Gerakan dalam Proses Pembentukan Propinsi Banten. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1), 61–90.
- Chandakirana, K. (1989). Geertz dan Masalah Kesukuan. *Jakarta. Prisma*, 2.
- Daliman, A. (2012). *Metode penelitian sejarah*. Penerbit Ombak.
- Landsberger, H. A. (1970). McLaughlin (ed.): *STUDIES IN SOCIAL MOVEMENTS: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE* (Book Review). *Social Forces*, 48(3), 421.
- Lubis, N. H., & Ali, M. (2014). *Sejarah Banten: membangun tradisi dan peradaban*.
- Mansur, K. (2001). *Perjuangan rakyat Banten menuju provinsi: catatan kesaksian seorang wartawan*. Kadin Banten.
- Moh Ali, F. (2021). *Dari Sunda Menuju Banten. Esai-Esai Arkeologi Etnisitas*. Untirta Press.
- Mulyana, Y. (2009). *Meretas Kemandirian*. Serang: Disbudpar Banten.
- Nazara, C. M. (2006). *Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pemekaran*



Provinsi Banten.

Rasyid, M. R. (1997). *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Yarsip Watampone.

Soekanto, S. (2002). *Teori peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sukmana, O. (2016). *Konsep dan teori gerakan sosial*. Intrans Publishing.

Tihami, H. (2000). *Banten Dalam Peralihan*. YASFI.